



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dr. Sutomo Nomor : 14 Tebing Tinggi 20623 Telepon (0621) 21272 Fax. (0621) 21273

Tebing Tinggi, 0 Maret 2025

Nomor : 500/1047/Ekosda
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Laporan Anggaran GAP, GBS Semester I Tahun 2025 dan SK Focal Point Tahun 2025

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi di -

Tebing Tinggi

Sehubungan Surat Plt. Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor : 400.2.2/1938/DP3APM, tanggal 6 Maret 2025, perihal Permintaan Laporan Anggaran GAP, GBS Semester I Tahun 2025 dan SK Focal Point Tahun 2025, maka bersama ini Kami kirimkan Laporan Anggaran GAP, GBS Semester I Tahun 2025 dan SK Focal Point Tahun 2025 dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

**Plt. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI**



**SAFARUDDIN, S.Sos, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740204 200701 1 003**

Tembusan :

- Yth. Bapak Walikota Tebing Tinggi (sebagai laporan)

**MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

Kebijakan/ Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
<p>PROGRAM : Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>KEGIATAN : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</p> <p>TUJUAN : Terlaksananya Kebijakan Perekonomian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta rapat yang hadir pada kegiatan BLUD dan BUMD lebih banyak yang hadir perempuan dari pada laki-laki - Penyusunan rencana kegiatan belum didasarkan data lapangan/terpilah antara laki-laki dan perempuan. - Setiap 6 bulan dilakukan Rapat dan monitoring : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat BLUD dengan jumlah peserta laki-laki sebanyak 11 orang (31%) dan 24 orang perempuan (69%) <ul style="list-style-type: none"> - Peserta didominasi oleh Perempuan - Regulasi tentang BLUD dan BUMD diatur dalam Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Akses : - Partisipasi: Perempuan lebih dominan - menghadiri rapat dengan persentase sebesar 69% dari pada laki-laki yang hanya sebesar 31%, sehingga perempuan lebih dapat menerima manfaat dari kegiatan tersebut. - Kontrol : didominasi Perempuan - Manfaat : Perempuan lebih menerima manfaat dari kegiatan tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum sepenuhnya memahami Gender, PUG dan PPRG aparat di OPD, Focal Point Gender di telah diberdayakan. - Penyusunan rencana kegiatan belum didasarkan data lapangan/terpilah antara laki-laki dan perempuan. - Koordinasi antara Sub Bag yang menangani belum maksimal - Mekanisme Koordinasi Monitoring dan Evaluasi belum berbasis gender 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang Berbasis Gender 	<p>TUJUAN PROGRAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Kebijakan Perekonomian yang Berbasis Gender 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Sosialisasi Advokasi tentang pemahaman Gender dan PUG aparat di OPD - Melakukan Penyusunan rencana kegiatan didasarkan data lapangan/terpilah antara laki-laki dan perempuan. - Memperbaharui data Focal Point Gender sekaligus menjadikan data terpilah sebagai acuan Perencanaan Program - Melakukan sosialisasi PUG ke BUMD dan BLUD 	<p>Peserta didominasi oleh Perempuan yakni dari jumlah 35 orang peserta Perempuan sebanyak 24 orang (69%) laki-laki 11 orang (31%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya rapat BUMD dan BLUD yang responsif gender melalui peningkatan keterwakilan peserta Perempuan dari 69% - Peningkatan pemahaman masyarakat tentang gender dengan melibatkan perempuan pada kegiatan BUMD dan BLUD
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta rapat yang hadir pada kegiatan TPID lebih banyak yang hadir laki-laki dari pada perempuan. - Jumlah peserta rapat yang hadir pada kegiatan TPAKD lebih banyak yang hadir laki-laki dari pada perempuan. - Penyusunan rencana kegiatan belum didasarkan data lapangan/terpilah antara laki-laki dan perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Akses : - Partisipasi: Laki laki lebih dominan - menghadiri rapat TPID dengan persentase sebesar 76,7 % dari pada perempuan yang hanya sebesar 23,3%, untuk rapat TPAKD dengan persentase sebesar 68,3 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman Gender, PUG dan PPRG aparat di OPD, Focal Point Gender di OPD belum diberdayakan. 			<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Sosialisasi Advokasi tentang pemahaman Gender dan PUG aparat di OPD - Melakukan Penyusunan rencana kegiatan didasarkan 	<p>Peserta didominasi oleh laki-laki yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat TPID dari jumlah 23 (76,7% orang peserta laki- laki dan sebanyak 7 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya rapat TPID, TPAKD, - Peningkatan pemahaman masyarakat tentang gender dengan

	<p>- Setiap bulannya dilakukan Rapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat TPID dengan jumlah peserta laki-laki sebanyak 23 orang (76,7%) dan 7 orang perempuan (23,3%) 2. Rapat TPAKD dengan jumlah peserta laki-laki sebanyak 28 orang (68,3%) dan 13 orang perempuan (31,7%) 	<p>laki-laki % dan perempuan yang hanya sebesar 31,7%, dan sehingga perempuan kurang menerima manfaat dari kegiatan tersebut.</p> <p>- Kontrol : untuk rapat TPID, TPAKD tahun 2024 didominasi oleh laki-laki,</p> <p>- Manfaat : Perempuan kurang menerima manfaat dari kegiatan tersebut.</p>	<p>Penyusunan rencana kegiatan belum didasarkan data lapangan/terpilah dan untuk antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>- Koordinasi antara pejabat yang menangani belum maksimal</p> <p>- Mekanisme Koordinasi Monitoring dan Evaluasi belum berbasis gender</p> <p>- Koordinasi antara pejabat yang menangani belum maksimal</p> <p>- Mekanisme Koordinasi Monitoring dan Evaluasi belum berbasis gender</p>		<p>data lapangan/terpilah antara laki-laki dan perempuan</p> <p>- Memperbarui data Focal Point Gender sekaligus menjadikan data terpilah sebagai acuan Perencanaan Program</p>	<p>orang (23,3%) perempuan</p> <p>- Rapat TPAKD dari jumlah 41 orang, peserta laki-laki sebanyak 28 orang (68,3%) perempuan 13 orang (31,7%)</p>	<p>melibatkan perempuan pada kegiatan TPID dan TPAKD.</p>
	<p>- Regulasi tentang TPAKD diatur Pada Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020 tentang strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 900/8234 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Pembentukan Tim TPAKD.</p> <p>- Regulasi tentang TPID diatur Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang sasaran inflasi tahun 2022, 2023, dan tahun 2024</p> <p>- Penyusunan rencana kegiatan belum didasarkan data lapangan/terpilah antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>-</p>						

Tebing Tinggi, Maret 2025

**Pt. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI**



**SAFARUDDIN, S.Sos, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740204 200701 1 003**

**MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

Kebijakan/ Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
<p>PROGRAM : Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>KEGIATAN : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</p> <p>TUJUAN : Terpantaunya Kebijakan Sumber Daya Alam</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta rapat yang hadir pada kegiatan Koordinasi lebih banyak yang hadir laki-laki daripada perempuan. - Penyusunan perencana kegiatan belum didasarkan data lapangan/terpilah antara laki-laki dan perempuan. - Setiap bulannya dilakukan Rapat dan monitoring : Rapat Koordinasi Penyaluran LPG 3 Kg dengan jumlah peserta sebanyak 207 peserta jumlah laki-laki sebanyak 140 orang (67,63%) dan 67 orang perempuan (32,37%) - Peserta didominasi oleh Laki-laki - Regulasi tentang ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2021 tentang penyedia, pendistribusian dan penetapan harga LPG 3 Kg. 	<ul style="list-style-type: none"> - Akses : - Partisipasi: Laki laki lebih dominan menghadiri rapat dengan persentase sebesar 67,63% dari pada perempuan yang hanya sebesar 32,37%, sehingga perempuan kurang menerima manfaat dari kegiatan tersebut. - Kontrol : didominasi oleh laki-laki, - Manfaat : Perempuan kurang menerima manfaat dari kegiatan tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman Gender, PUG dan PPRG aparat di OPD, Focal Point Gender di OPD belum diberdayakan. - Penyusunan perencana kegiatan belum didasarkan data lapangan/terpilah antara laki-laki dan perempuan. - Koordinasi antara Sub Bag yang menangani belum maksimal - Mekanisme Koordinasi Monitoring dan Evaluasi belum berbasis gender 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang Berbasis Gender 	<p>TUJUAN PROGRAM: Terlaksananya Kebijakan Sumber Daya Alam</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Sosialisasi Advokasi tentang pemahaman Gender dan PUG aparat di OPD - Melakukan Penyusunan perencana kegiatan didasarkan data lapangan/terpilah antara laki-laki dan perempuan. - Memperbaharui data Focal Point Gender sekaligus menjadikan data terpilah sebagai acuan Perencanaan Program - Melakukan sosialisasi PUG ke Agen dan Pangkalan 	<p>Peserta didominasi oleh laki-laki yakni dari jumlah 207 orang peserta laki-laki sebanyak 140 orang (67,63%) perempuan 67 orang (32,37%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya rapat Koordinasi Penyaluran LPG 3 Kg yang responsif gender melalui peningkatan keterwakilan peserta Perempuan dari 32,37% menjadi 50% - Peningkatan pemahaman masyarakat tentang gender dengan melibatkan perempuan pada kegiatan Koordinasi Penyaluran LPG 3 Kg
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta rapat yang hadir pada kegiatan Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup lebih banyak yang hadir laki-laki daripada perempuan. - Jumlah peserta rapat yang hadir pada kegiatan Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup lebih banyak yang hadir laki-laki daripada perempuan. - Jumlah peserta rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup lebih banyak yang hadir laki-laki daripada perempuan - Penyusunan perencana kegiatan belum didasarkan data lapangan/terpilah antara laki-laki dan perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Akses : - Partisipasi: Laki laki lebih dominan menghadiri rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup dengan persentase sebesar 55 % dari pada perempuan yang hanya sebesar 35% sehingga perempuan kurang menerima manfaat dari kegiatan tersebut, 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman Gender, PUG dan PPRG aparat di OPD, Focal Point Gender di OPD belum diberdayakan. - Penyusunan perencana kegiatan belum didasarkan data lapangan/terpilah dan untuk antara laki-laki dan perempuan. - Koordinasi antara Sub Bag yang menangani belum 			<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Sosialisasi Advokasi tentang pemahaman Gender dan PUG aparat di OPD - Melakukan Penyusunan perencana kegiatan didasarkan data lapangan/terpilah antara laki-laki dan perempuan. - Memperbaharui data 	<p>Peserta didominasi oleh laki-laki yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup dari jumlah 20 orang peserta laki-laki sebanyak 13 orang (65%) perempuan 7 orang (35%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup yang responsif gender melalui peningkatan keterwakilan peserta Perempuan menjadi 50% - Peningkatan pemahaman masyarakat tentang gender dengan

	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap Semester dilakukan Rapat :: 1. Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup dengan jumlah peserta 20 orang jumlah laki-laki sebanyak 13 orang (65%) dan 7 orang perempuan (35%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrol : untuk rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup didominasi oleh laki-laki, - Manfaat : Perempuan kurang menerima manfaat dari kegiatan tersebut. 	<p>maksimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme Koordinasi Monitoring dan Evaluasi belum berbasis gender 		<p>Focal Point Gender sekaligus menjadikan data terpilah sebagai acuan Perencanaan Program</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi PUG ke Agen dan Pangkalan. 		<p>melibatkan perempuan pada kegiatan Bidang Lingkungan Hidup</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta rapat yang hadir pada kegiatan Koordinasi Bidang Pertanian lebih banyak yang hadir Perempuan daripada laki-laki - Jumlah peserta rapat yang hadir pada kegiatan Koordinasi Bidang Pertanian lebih banyak yang hadir Perempuan daripada laki-laki. - Jumlah peserta rapat Koordinasi Bidang Pertanian lebih banyak yang hadir perempuan daripada laki-laki - Penyusunan rencana kegiatan belum didasarkan data lapangan/terpilah antara laki-laki dan perempuan. - Setiap Semester dilakukan Rapat :: 1. Rapat Koordinasi Bidang Pertanian dengan jumlah peserta 20 orang jumlah laki-laki sebanyak 9 orang (45%) dan 11 orang perempuan (55%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Akses : - Partisipasi: Perempuan lebih dominan menghadiri rapat Koordinasi Bidang Pertanian dengan persentase sebesar 55% dari pada laki-laki yang hanya sebesar 45 % sehingga laki-laki kurang menerima manfaat dari kegiatan tersebut, - Kontrol : untuk rapat Koordinasi Bidang Pertanian didominasi oleh Perempuan, - Manfaat : Laki-laki kurang menerima manfaat dari kegiatan tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman Gender, PUG dan PPRG aparat di OPD, Focal Point Gender di OPD belum diberdayakan. - Penyusunan rencana kegiatan belum didasarkan data lapangan/terpilah dan untuk antara laki-laki dan perempuan. - Koordinasi antara Sub Bag yang menangani belum maksimal - Mekanisme Koordinasi Monitoring dan Evaluasi belum berbasis gender 		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Sosialisasi Advokasi tentang pemahaman Gender dan PUG aparat di OPD - Melakukan Penyusunan rencana kegiatan didasarkan data lapangan/terpilah antara laki-laki dan perempuan. - Memperbaharui data Focal Point Gender sekaligus menjadikan data terpilah sebagai acuan Perencanaan Program - Melakukan sosialisasi PUG ke OPD yang membidangi Pertanian 	<p>Peserta didominasi oleh Perempuan yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi Bidang Pertanian dari jumlah 20 orang peserta laki-laki sebanyak 9 orang (45%) perempuan 11 orang (55%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya rapat Koordinasi Bidang Pertanian yang responsif gender melalui peningkatan keterwakilan peserta laki-laki menjadi 50% - Peningkatan pemahaman masyarakat tentang gender dengan melibatkan laki-laki pada kegiatan Bidang Lingkungan pertanian

Tebing Tinggi, Maret 2025

**Pt. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI**



**SAFARUDDIN, S.Sos, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740204 200701 1 003**

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
UNIT ORGANISASI : PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
UNIT ESELON/SATKER : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
KEGIATAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Laporan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
OUT PUT KEGIATAN	Dokumen/Laporan
ANALISIS SITUASI	<p>Regulasi tentang pelaksanaan kebijakan Perekonomian berdasarkan kegiatannya sebagai berikut : kegiata BLUD dan BUMD diatur Pada Permendagri No. 79 tahun 2018 tentang Bada Layanan Umum Daerah dan PP No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, untuk TPAKD diatur pada Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 900/8234 tanggal 13 Agustus 2019 tentang pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, dan untuk TPID diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang sasaran inflasi tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024, untuk kegiatan ini yang responsif gender belum terakomodir. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang hadir mengikuti rapat dan FGD. Setiap tahunnya Bagian Perekonomian dan SDA melakukan rapat dan Focus Group Discussion (FGD) dengan komposisi peserta laki-laki dan perempuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat BLUD dengan jumlah peserta laki-laki sebanyak 11 orang (31%) dan 24 orang perempuan (69%) 2. Rapat TPID tiap bulannya dengan jumlah peserta laki-laki 23 orang (76,7%) dan perempuan 7 orang (23,3%) 3. Rapat TPAKD dengan jumlah peserta laki-laki sebanyak 28 orang (68,3%) dan perempuan 13 orang (31,7%) <p>Dari kondisi peserta yang hadir dari beberapa kegiatan tersebut didominasi oleh laki-laki mengingat tingkat disiplin kehadiran lebih disiplin laki-laki. Kondisi kesenjangan tersebut disebabkan oleh Masih kurangnya pemahaman Gender, PUG dan PPRG aparat di OPD, Focal Point Gender di OPD belum diberdayakan, Penyusunan perencana kegiatan belum didasarkan data lapangan/terpilah antara laki-laki dan perempuan, Koordinasi antara bidang yang menangani dan perencana keuangan belum maksimal, dan belum maksimalnya Mekanisme Monitoring dan Evaluasi serta adanya Organisasi BUMD dan BLUD yang belum maksimal dalam menerapkannya di Kota Tebing Tinggi,</p>
CAPAIAN PROGRAM	<p>Tolok Ukur : Meningkatnya pelayana BUMD dan BLUD serta perekonomian di Kota Tebing Tinggi</p> <p>Indikator dan Target Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya koordinasi dan monitoring BLUD dan yang responsif gender melalui peningkatan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan • Peningkatan pemahaman masyarakat tentang gender
JUMLAH ANGGARAN	Rp. 344.312.052,-

PROGRAM			
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Melakukan Sosialisasi Advokasi tentang pemahaman Gender dan PUG aparat di OPD	
		Masukan	Rp. 0
		Keluaran	Terlaksananya Sosialisasi Advokasi tentang pemahaman Gender dan PUG aparat di OPD
		Hasil	Meningkatkan pemahaman Gender dan PUG aparat di OPD
	Kegiatan 2	Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
		Masukan	Rp. 35.793.900,-
		Keluaran	Jumlah dokumen hasil Kordinasi, Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan BUMD dan BLUD
		Hasil	Terkoordinasi dan termonitoringnya kebijakan BUMD dab BLUD
	Kegiatan 3	Pengendalian dan distribusi Perekonomian	
		Masukan	300.248.252,-
		Keluaran	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi Perekonomian
		Hasil	Terkendalnya perekonomian
	Kegiatan 4	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
		Masukan	Rp. 8.269.900,-
		Keluaran	- Jumlah Dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro Kecil
		Hasil	- Termonitornya UMKM di Kota Tebing Tinggi
	Kegiatan 5	Melakukan sosialisasi PUG ke BUMD, BLUD dan UMKM	
		Masukan	Rp. 0
		Keluaran	Terlaksananya Sosialisasi PUG ke BUMD, BLUD dan UMKM

		Hasil	Meningkatkan pemahaman Gender dan PUG aparat di BUMD, BLUD dan UMKM
--	--	-------	---

Tebing Tinggi, Maret 2025

**Pt. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI**



**SAFARUDDIN, S.Sos, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740204 200701 1 003**

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
UNIT ORGANISASI : PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
UNIT ESELON/SATKER : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
KEGIATAN	Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Laporan kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam
OUT PUT KEGIATAN	Dokumen/Laporan
ANALISIS SITUASI	<p>Regulasi tentang Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam sebagai berikut : Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2021 Tentang Penyedia, Pendistribusian dan Penetapan harga LPG 3 Kg, untuk kegiatan ini yang responsif gender belum terakomodir. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang hadir mengikuti rapat dan jumlah Pemilik Pangkalan LPG. Setiap bulannya Bagian Perekonomian dan SDA melakukan rapat Koordinasi LPG dan persemester rapat Koordinasi kebijakan Lingkungan Hidup dan Kebijakan Pertanian dengan komposisi peserta laki-laki dan perempuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi dan Evaluasi LPG 3 Kg dari 207 pangkalan dan 5 Agen dengan jumlah peserta laki-laki sebanyak 140 orang (67,63%) dan 67 orang perempuan (32,37%) 2. Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup jumlah 20 peserta, laki-laki 13 orang (65%) dan perempuan 7 orang (35%) 3. Rapat Koordinasi Bidang Pertanian, Pangan, Perdagangan, UMKM, Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan jumlah peserta 20 orang, laki-laki sebanyak 9 orang (45%) dan perempuan 11 orang (55%) <p>Dari kondisi peserta didominasi oleh laki laki mengingat laki laki lebih berperan dalam bidang tersebut, dari 247 (Dua ratus lima puluh tujuh) peserta yang hadir mengikuti rapat dari tiga kegiatan, ada sebanyak 162 Orang Peserta laki-laki (65,58%) dan 85 Orang perempuan (34,42%), terlihat adanya kesenjangan gender.</p> <p>Kondisi kesenjangan tersebut disebabkan oleh Masih kurangnya pemahaman Gender, PUG dan PPRG aparat di OPD, Focal Point Gender di OPD belum diberdayakan, Penyusunan rencana kegiatan belum didasarkan data lapangan/terpilah antara laki-laki dan perempuan.</p>
CAPAIAN PROGRAM	<p>Tolok Ukur : Terpantaunya kebijakan sumber daya alam di Kota Tebing Tinggi</p> <p>Indikator dan Target Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya rapat koordinasi dan Evaluasi LPG 3 Kg rapat bidang Lingkungan Hidup dan Rapat Koordinasi Bidang Pertanian, Pangan, Perdagangan, UMKM, Perindustrian dan Tenaga Kerja yang responsif gender melalui peningkatan keterwakilan peserta perempuan dari 34,42% menjadi 50% • Peningkatan pemahaman masyarakat tentang gender dengan mengikis budaya di masyarakat, perempuan sebagai keluarga belum mampu melakukan hal tersebut diatas.
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 106.942.600,-

RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Melakukan Sosialisasi Advokasi tentang pemahaman Gender dan PUG aparat di OPD	
		Masukan	Rp. 0
		Keluaran	Terlaksananya Sosialisasi Advokasi tentang pemahaman Gender dan PUG aparat di OPD
		Hasil	Meningkatkan pemahaman Gender dan PUG aparat di OPD
	Kegiatan 2	Melakukan koordinasi bidang Pertanian	
		Masukan	Rp. 5.793.300,-
		Keluaran	dilakukan koordinasi dengan OPD terkait bidang pertanian, perdagangan, perindustrian, KUKM, Penanaman modal dan tenaga kerja
		Hasil	Terkoordinasi antara OPD terkait bidang pertanian, perdagangan, perindustrian, KUKM, Penanaman modal dan tenaga kerja
	Kegiatan 3	- Melakukan Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup	
		Masukan	Rp. 6.020.900,-
		Keluaran	dilakukan koordinasi dengan OPD terkait bidang lingkungan Hidup
		Hasil	- Terkoordinasi antara OPD terkait bidang lingkungan hidup
	Kegiatan 4	Melakukan rapat bersama OPD dan instansi terkait serta monitoring LPG 3 Kg	
		Masukan	Rp. 95.128.400,-
		Terlaksananya rapat, bersama OPD dan instansi terkait serta Agen dan Pangkalan LPG serta monitoring Penyaluran LPG 3 Kg	Terlaksananya rapat, bersama OPD dan instansi terkait serta Agen dan Pangkalan LPG serta monitoring Penyaluran LPG 3 Kg
Rapat, dan monitoring akan meningkatkan pemantauan kebijakan sumber		Rapat, dan monitoring akan meningkatkan pemantauan kebijakan sumber	

		daya alam di Kota Tebing Tinggi	daya alam di Kota Tebing Tinggi
	Kegiatan 5	Melakukan sosialisasi PUG ke Agen dan Pangkalan LPG 3 kg	
		Masukan	Rp. 0
		Keluaran	Terlaksananya Sosialisasi PUG ke Agen dan Pangkalan
		Hasil	Meningkatkan pemahaman Gender dan PUG aparat di Agen dan Pangkalan

Tebing Tinggi, Maret 2025

**Pt. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI**



**SAFARUDDIN, S.Sos, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740204 200701 1 003**



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dr. Sutomo Nomor : 14 Tebing Tinggi 20623 Telepon (0621) 21272 Fax. (0621) 21273

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR : 100.3/ 226 /EKOSDA TAHUN 2025

T E N T A N G

FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

- Menimbang** :
- bahwa masih adanya kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan seperti bidang sosial budaya, ekonomi, politik dan pelayanan publik yang merupakan faktor penghambat untuk mencapai keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya dalam membangun Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam bidang pemberdayaan Perempuan;
 - bahwa pembangunan Pemberdayaan Perempuan adalah merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan suatu strategi untuk mencapai tujuan yaitu Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai wadah untuk mendukung percepatan terciptanya komitmen di Lembaga Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
 - bahwa untuk mendukung, mendorong, mengefektifkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi secara terpadu dan terkoordinir dipandang perlu untuk membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat** :
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah;
 - Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
 - Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Tebing Tinggi;
 - Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 463/1191 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 463/732 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Tebing Tinggi.
 - Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2025;

8. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi :
1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi;
 2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi yang responsif gender;
 3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi;
 4. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi;
 5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi; dan
 6. Memfasilitasi penyusunan data gender pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.
- KETIGA** : Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi ini melaksanakan pertemuan minimal 1 (satu) kali setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT** : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi menunjuk Focal Point PUG sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.
- KELIMA** : Segala biaya pelaksanaan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di bebaskan pada DPA Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 03 Maret 2025

**Plt. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI**



SAFARUDDIN, S.Sos, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740204 200701 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.

Nomor : 100.3.3/ 916 /Ekosda Tahun 2025
Tanggal : 03 Maret 2025

**SUSUNAN ANGGOTA FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

- I. PEMBINA** : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya alam Sekretariat Daerah
Kota Tebing Tinggi.
- II. KETUA** : Safaruddin, S.Sos, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
- III. ANGGOTA** :
1. Safarina, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 2. Tri Ariyani, SE, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 3. Tiur mariani Purba Tanjung, ST (Penelaah Teknis Kebijakan)
 4. Zitni Rizqi, SE (Penelaah Teknis Kebijakan)
 5. Theresia Sepriyanti Purba, SE (Penelaah Teknis Kebijakan)
 6. Tommy Parasian Pane, SE (Penelaah Teknis Kebijakan)
 7. Hendriks Carly Manullang, S.AB (Penelaah Teknis Kebijakan)

**Pt. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI**



**SAFARUDDIN, S.Sos, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740204 200701 1 003**